

**HOTLINE REDAKSI**

Telp. (0751) 25001-36923  
 Fax. (0751) 33572  
 email : singgalang.redaksi@gmail.com  
 website : www.hariansinggalang.co.id  
 epaper : epaper.hariansinggalang.co.id

**INFO & PENGADUAN**

Tlp. (0751) 25001-38338  
 Fax. (0751) 811005  
 Iklan : 08126605015  
 Pemasaran : 085355173999  
 Redaksi : (0751) 36923  
 email : iklinggalang@yahoo.co.id

Senin, 2 Oktober 2023 (17 Rabiul Awal 1445 H)

20 Halaman (Dalam 3 Bagian)

**Rp5.000,-** + Luar Kota + Ongkos Kirim



**Jadwal Shalat Hari Ini**

Subuh : 04.50 WIB  
 Zuhur : 12.12 WIB  
 Ashar : 15.15 WIB  
 Maghrib : 18.15 WIB  
 Isya : 19.23 WIB

Sumber: Kompas.com

**KOMENTAR**

## Negeri Ini Berasap, Bos!

SAWIR PRIBADI

SEMINGGU terakhir, kabut asap semakin tebal di Sumatera Barat dan provinsi-provinsi tetangga di Sumatera. Langit yang biasa jernih, kini sudah berjebebu. Pekat! Jarak pandang semakin terbatas.

Di masjid, di lepau atau di tempat-tempat orang banyak berkumpul, sudah ada yang batuk-batuk. Beberapa orang di antaranya dengan kesadaran sendiri mengenakan masker.

Ini adalah salah satu dampak dari kabut asap. Belum ada ikhtiar nyata dari pemerintah daerah untuk mengurangi sebaran kabut asap tersebut. Juga tidak ada instruksi khusus bagi anak sekolah. Proses belajar mengajar masih tetap dalam kondisi normal. Bahkan, rata-rata anak sekolah tidak bermasker.

Ada yang teringat, ketika kabut asap menyelimuti Kota Jakarta dan sekitarnya, semua kalang kabut. Pemerintah pusat dan DPR memutar otak mencari solusi. Berbagai upaya pun dilakukan dan sejumlah analisa hingga saran dari ahli dan non-ahli mengempuk ke permukaan, menyalahkan ini itu.

Karena kabut asap Jakarta itu pula ada razia emisi. Banyak kendaraan bermotor yang terjaring dengan denda ratusan juta rupiah. Bahkan muncul ide bahwa kendaraan yang tidak lolos uji emisi dilarang masuk Jakarta. Apa iya kabut asap atau polusi setebal itu akibat gas knalpot kendaraan?

Tudingan demi tudingan sebagai penyebab asap di Jakarta terus saja bermunculan. Selain karena faktor gas buang kendaraan bermotor, juga Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dituding sebagai penyebab polusi dimaksud. Jika tidak terkesan nyeleneh, mungkin asap dapur, asap rokok, asap obat anti nyamuk hingga kentut bisa dituding sebagai penyebabnya.

Kini kabut asap sudah menyelimuti Sumatera Barat dan provinsi tetangga. Apakah ada yang kasak-kusuk mencari solusi? Lalu, upaya apa yang telah dilakukan?

Bersambung ke A-7



PEMBAGIAN MASKER

Petugas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan memasangkan masker kepada bocah di simpang lima DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Minggu (1/10). Dinkes setempat membagikan 3,7 juta masker kepada masyarakat untuk mencegah terjangkitnya penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat bencana kabut asap di Palembang sebagai dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah Kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. (Antara)

**PERINGATI HARI JADI KE-78**

# Sumbang Perlu Berlari Kejar Kemajuan

**PADANG - SINGGALANG**

Tepat 1 Oktober kemarin, diperingati Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat (Sumbang) yang ke-78. Di umur tersebut banyak hal yang masih perlu dicapai agar Sumbang tak tertinggal dibanding provinsi-provinsi lain.

Dosen Universitas Indonesia (UI) yang juga mantan Dirjen Otonomi Daerah (Otda), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Djohermansyah Djohan mengatakan, dari lima indikator



penting suatu daerah, ada tiga yang harus menjadi perhatian serius. Ini dikarenakan ada yang angkanya di bawah rata-rata nasional atau ada yang masih di bawah nilai kategori tinggi.

"Yakni kategori IPM (indeks pembangunan manusia), pertumbuhan ekonomi dan kemampuan fiskal (APBD)," ujar Djohermansyah saat menjadi nara sumber dalam rapat paripurna peringatan Hari Jadi Sumbang ke-78 di Gedung DPRD Sumbang.

Ia memaparkan, IPM Sumbang pada tahun 2023 memang naik

Bersambung ke A-7

Craha Kemandirian  
**DOMPET DHUFAA SINGGALANG**  
 Jl. Ir. H. Juanda No. 31 C, Pasar Pagi, Padang Barat, Kota Padang

**Zakat Penghasilan**  
 Sumber yang bersih lebih aman, lebih barokah

Salurkan Zakat Anda melalui:  
**mandiri 111.000.500.4888**  
 an Dompet Dhuafa Singgalang  
**BSI 234.2222.40**  
 an Dompet Dhuafa Republik

Informasi: (0751) 40096 & 081267023333

www.ddsinggalang.org

**Pojok**

- + Sumbang perlu berlari kejar kemajuan  
 - Balari buliah, tapi jan lupu mauka angk...
- + Harga Pertamina cs naik  
 - Lun balari, minyak abih, ka dibali lah maha se...

*fragsana*

## Harga Pertamina cs Naik



**Jakarta, Singgalang**  
 PT Pertamina (Persero) baru saja melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi alias Pertamina cs. Harga Pertamina naik dari Rp 13.300 menjadi Rp 14.000 per liter.

Irto Ginting menjelaskan, penyesuaian berkala dan penetapan harga BBM Jenis BBM Umum (JBU) atau BBM non subsidi mengacu pada regulasi pemerintah yakni Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Formula

Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis BBM dan Minyak Solar.

"Penyesuaian harga mengacu pada rata-rata MOPS (Means of Platts Singapore) pada periode 25 Agustus 2023 hingga 24 September 2023. Harga baru ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5% seperti di wilayah DKI Jakarta," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (1/10).

Dia mengatakan, harga produk Pertamina masih termasuk kompetitif dibanding perusahaan lain

## Usut Upaya Pelenyapan Dokumen di Kementan

**JAKARTA** - Kisruh pengusutan dugaan korupsi yang menyeret nama Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) berbuntut panjang. Selain dugaan korupsi, perkara berlanjut ke temuan 12 senjata api di rumah dinas Mentan hingga upaya pelenyapan dokumen saat KPK menggeledah Kementan.



Mahfud Md

kam Mahfud Md meminta setiap perkara yang terkait kasus tersebut diusut tuntas. Mulai dugaan

Bersambung ke A-7

**ADVERTORIAL**

**PERINGATI 14 TAHUN GEMPA PADANG**

## Wako Hendri Septa Kukuhkan Kecamatan Tangguh Bencana



**PADANG** - Gempa besar 7,6 SR pernah menghoyak Kota Padang. Tepatnya, 30 September 2009, atau 14 tahun silam. Ratusan jiwa melayang, bangunan hancur lebur. Ketika itu Padang seperti buah rambai jatuh ke tanah, berserak-serak.

Ingatan itu kembali saat peringatan 14 tahun gempa Padang, Sabtu (30/9/2023). Di Tugu Gempa, Wali Kota Padang Hendri Septa hadir bersama keluarga korban gempa. Termasuk seluruh kepala OPD di lingkup kerjanya.

Tidak saja melakukan tabur bunga

Bersambung ke A-7

**ADVERTORIAL**

**HARI KESAKTIAN PANCASILA**

## Hendri Septa: Anak Muda Jangan Terpengaruh Paham Radikal



**PADANG** - Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Walikota Padang, Hendri Septa ingatkan kaum muda tidak terpengaruh oleh paham radikal. Akibat paham yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila tersebut, bisa menyebabkan diri, keluarga bahkan negara hancur.

"Sama-sama kita ketahui, tepatnya pada 30 September 1965, negara kita sempat dirongrong oleh paham yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Akibatnya, ada pemimpin dan masyarakat yang

Bersambung ke A-7



ENNY NURBANINGSIH

**JAKARTA** - Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan lembaganya sudah siap mengadili sengketa Pemilu 2024. Sejumlah langkah telah dilakukan, dari membuat regulasi terkait hingga memberikan bimbingan teknis ke para pihak yang berperan dalam sidang sengketa pemilu. Enny juga menegaskan lembaganya bukan Mahkamah Kalkulator.

"Seluruh regulasi yang terkait itu sudah kami siapkan dan kami juga sudah memberikan bimbingan teknis kepada stakeholders terkait. Terutama partai politik peserta pemilihan umum kemudian KPU, Bawaslu dan dalam waktu dekat ini kami akan

## Negeri Ini Berasap, ...

Bukankah dampak kabut asap di daerah ini sama saja dengan dampak yang terjadi di DKI? Atau jangan-jangan kabut asap di Sumbar dan provinsi lain di Sumatera ini dianggap sudah jinak, sehingga tidak membahayakan?

Ah, janganlah begitu! Apa yang menjadi dampak dari kabut asap di DKI juga bisa menyerang manusia-manusia di luar DKI. Bila warga Jabodetabek bisa terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) oleh kabut asap, maka orang sini juga bisa begitu. Bukankah organ tubuh manusia itu sama?

Oleh karena itu, bergeraklah wahai tuan penguasa. Jujurilah dengan mata hati bahwa kabut asap sudah begitu pekat di daerah ini dan membahayakan. Jangan sibuk dengan persiapan pemilu saja.

Pun begitu dengan pemerintah daerah, jangan menunggu instruksi pemerintah pusat. Lakukan saja apa yang bisa dilaksanakan segera. Menunggu perintah dari pemerintah pusat,

## Harga Pertamina ...

untuk produk dengan kualitas setara. Harga tersebut juga telah memenuhi ketentuan batas atas pada periode Oktober 2023 yang ditetapkan untuk setiap jenis BBM.

"Perubahan harga BBM Pertamina memper timbangan berbagai aspek diantaranya tren harga publikasi MOPS/Argus dan Kurs, agar tetap dapat menjamin keberlangsungan penyediaan dan penyaluran BBM hingga ke seluruh pelosok Tanah Air," katanya.

Sementara itu, dia memastikan harga Peralite dan solar tetap atau tidak berubah.

"Untuk BBM Penugasan (JBKP) Peralite harga tetap Rp 10.000 per liter dan BBM Subsidi (JBT) Solar tetap Rp 6.800 per liter sesuai yang ditetapkan pemerintah," katanya.

Irto menjelaskan, penyesuaian berkala dan penetapan harga BBM Jenis BBM Umum (JBU) atau BBM non subsidi mengacu pada regulasi pemerintah yakni Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga

## Hendri Septa: Anak Muda ...

menjadi korban dari mereka yang mempunyai paham yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila," ucap Hendri Septa saat menghadiri Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Halaman Kantor Pemerintah Kota Padang, Minggu (1/10).

Ia bersyukur hingga saat ini Indonesia masih dilindungi dari hal yang bisa merusak ideologi Pancasila. "Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar setiap tahun, bertujuan agar kita mawas diri. Jangan sampai memberikan celah sedikitpun terkait paham radikal atau paham yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila," harap Hendri Septa.

Ia juga menyebutkan, agar generasi muda menjauhi paham radikal ini. Pemerintah Kota Padang bersama lapisan masyarakat akan berupaya mempertahankan ideologi bangsa ini dan berusaha menjaga anak muda agar tidak terpengaruh paham yang tidak sesuai dengan Pancasila.

## Wako Hendri Septa ...

di tugu itu. Hendri Septa juga mengukuhkan kecamatan tangguh bencana (Kencana). Dalam sambutannya, Hendri Septa mengajak seluruh warga Kota Padang dapat mengambil hikmah atas kejadian bencana gempa 30 September 2009 silam.

"Sudah 14 tahun lalu gempa dahsyat melanda hingga meluluhlantakkan semua bangunan milik warga, infrastruktur pemerintah dan bahkan menelan korban jiwa sebanyak 383 orang warga Kota Padang," katanya.

Wako berpesan agar seluruh masyarakat lebih meningkatkan kesiapsiagaan menyikapi potensi berbagai bencana yang kapan dan di mana saja bisa terjadi. Ditambah lagi, Kota Padang termasuk daerah yang rawan bencana seperti gempa, banjir dan lainnya.

Wako mengungkapkan dengan kehadiran Satgas Kencana ini, pemerintah siap siaga membantu masyarakat jika terjadi bencana. "Ini upaya berkelanjutan, bagaimana pemerintah sampai keajaiban di bawah yakni tingkat Kecamatan dan kelurahan punya Satgas, sama seperti Covid yang lalu. Hanya saja, kalau bencana ini kan tidak tampak atau tidak tau kapan datangnya," ujarnya.

Hendri Septa mengatakan, saat ini gedung-gedung yang ada di Kota Padang sangat ramah gempa. "Gedung yang ada di Kota Padang pada saat ini ramah terhadap gempa. Gedung-gedung yang ada tidak boleh tinggi dari ketinggian yang ditentukan seperti Hotel Ibis Padang yang memiliki isolator bantalan karet sebagai

SIAP HADAPI SENGKETA PEMILU 2024

# MK Bukan Mahkamah Kalkulator

mengadakan kegiatan untuk advokat. Tetapi terus terang saja ini tidak bisa menjangkau semuanya apalagi seratus persen. Karena memang ada handicap waktu dan budget di situ. Sehingga perwakilan-perwakilan dari partai politik, KPU, Bawaslu dan mungkin advokat hanya dua angkatan saja," kata Enny sebagaimana dilansir website Mahkamah Konstitusi (MK), Minggu (1/10).

Hal itu juga disampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara ke-2 (KNAPHTN-HAN ke-2), pada Sabtu (30/9) di Batam. Turut hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut yakni Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah serta Idham Khalid mewakili KPU.

Enny menyampaikan MK telah menyiapkan piranti untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Padahal, menurut Enny, berdasarkan pengalamannya, pada saat penyelesaian perselisihan hasil itu ia melihat banyak hal yang perlu dipahami dengan sangat baik terutama bagi partai peserta pemilu termasuk penyelenggaranya. Hal ini dikarenakan biasanya persidangan speedy trial dibatasi oleh waktu.

terkadang seperti menunggu kucing menjemput api, entah kapan tibanya. Bukankah mereka tengah sibuk? Ya sibuk dengan urusan bakal calon wakil presiden, sibuk dengan penyelesaian target menjelang akhir jabatan dan lain-lain sebagainya.

Negeri ini sudah berasap bos. Ini bencana. Maka hentikanlah membakar lahan wahai pengusaha. Jangan korbankan rakyat banyak demi membuka lahan. Ingat, di antara rakyat yang terdampak mungkin terdapat keluarga kalian, dunsanak atau mungkin juga orang kampung kalian. Maka padamkanlah api di lahan kalian.

Kepada pemerintah secara keseluruhan, lakukanlah tindakan nyata segera. Jika memang harus meliburkan sekolah atau sekolah daring untuk sementara misalnya, lakukan saja. Jangan tunggu korban berjatuhan. Bukankah lebih baik mencegah suatu penyakit ketimbang mengobatinya? Ini Bahasa pemerintah, lho!  
Nah, tunggu apa lagi? (\*)

Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis BBM dan Minyak Solar.

Dia bilang, untuk harga BBM jenis gasoil Dextrite mengalami penyesuaian naik harga menjadi Rp 17.200 dan Pertamina Dex disesuaikan menjadi Rp 17.900. Kemudian, harga BBM jenis gasoline mengalami penyesuaian naik harga di mana Rp 16.600 untuk Pertamina Turbo, Rp 16.000 untuk Pertamina Green E5 dan Rp 14.000 untuk Pertamina.

"Penyesuaian harga mengacu pada rata-rata MOPS (Means of Platts Singapore) pada periode 25 Agustus 2023 hingga 24 September 2023. Harga baru ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5% seperti di wilayah DKI Jakarta," katanya.

Lanjutnya, harga produk Pertamina masih termasuk kompetitif dibandingkan perusahaan lain untuk produk dengan kualitas setara dan harga tersebut telah memenuhi ketentuan batas atas pada periode Oktober 2023 yang ditetapkan untuk setiap jenis BBM. (\*)

"Kita mengundang anak-anak kita dalam setiap kegiatan peringatan, agar mereka mengetahui apa yang akan dilakukan ketika menggantikan posisi kita saat ini," ujarnya.

Menurut Hendri Septa, generasi muda harus tahu cara berterimakasih kepada para pahlawan dan keluarganya yang telah gugur untuk memperjuangkan kedaulatan bangsa. "Mereka korbankan jiwa raga mereka untuk kita semua. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya," pungkasnya.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila kali ini bertemakan 'Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju'. Peringatan kali ini juga dihadiri Forkopimda Kota Padang dan berbagai elemen masyarakat, termasuk generasi muda yang ada di Kota Padang.

Dalam kesempatan tersebut, Wako Hendri Septa juga memberikan reward kepada Fathbiy Annafi Alra, siswa kelas 3 SMP Negeri 3 Padang, yang fasih dan lantang membacakan pembukaan UUD 1945 tanpa teks. (Adv)

penahan gempa," jelasnya.

Hendri Septa menambahkan, karena Kota Padang merupakan daerah yang rawan bencana alam gempa bumi, bangunan yang ada di Kota Padang tidak boleh memiliki lebih empat lantai.

"Gedung-gedung yang ada di Kota Padang hanya boleh 4 lantai. Hal ini untuk meminimalisir jika terjadi bencana. Selain itu, gedung-gedung yang ada telah ditetapkan ramah gempa," jelasnya.

Dalam hal mitigasi bencana, Hendri Septa menjelaskan warga Kota Padang sangat tanggap terhadap mitigasi yang telah dilakukan.

"Kita sering melakukan mitigasi bencana. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan warga kota untuk siap siaga ketika bencana alam terjadi," tambahnya.

Dlam kesempatan itu juga, Sekda Kota Padang Andree Algamar yang juga Plt Kalaksa BPBD Kota Padang menyebutkan, sejumlah kegiatan dilakukan dalam rangka momentum peringatan Gempa 30 September 2009 dan Hari Kesiapsiagaan Bencana di tahun 2023.

"Diantaranya mulai dari launching Padang Command Center (PCC) 112 pada 17 Agustus 2023, menggelar focus group discussions (FGD) terkait kebencanaan serta pengukuhan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) di 11 kecamatan se-Kota Padang," tutur Andree.

Hadir juga dalam kesempatan itu, Kalaksa BPBD Sumbar Rudy Rinaldy, Forkopimda Kota Padang, Kepala Stasiun Geofisika BMKG Padang Panjang Suaidi Ahadi serta Anggota DPRD Kota Padang Mastilizal Aye. Pemrakarsa Pembuatan Tugu Gempa Padang Andree Sofandi. (Adv)

"Waktu untuk pendaftaran itu sangat terbatas sekali. Jadi sangat terbatas sekali 3x24 jam untuk kemudian pendaftaran dari pileg, pilpres itu tiga hari setelah diumumkan begitu juga dengan pilkada," jelasnya di hadapan para peserta konferensi.

Sehingga, ia melanjutkan kebiasaan yang terjadi di situ para calon pemohon biasanya mereka akan menggunakan waktu yang lebih cepat daripada waktu yang telah ditentukan untuk waktu terakhirnya itu. Sehingga mereka (calon pemohon) menggunakan waktu yang lebih cepat di awalnya.

"Memang terdapat persoalan yang mana terkadang mereka khawatir ketika mengajukan permohonan itu takutnya tidak bisa masuk permohonananya. Sehingga mereka seperti dokter yang antri ambil nomer. Itu yang tidak boleh. Jadi pada waktu bimtek saya sampaikan andaipun anda akan mencalonkan dan sekarang sudah menjadi calon anggota legislatif, anda pun harus mempersiapkan kalah atau menang. Ketika siap kalah anda juga harus sudah mempersiapkan bagaimana dokumen-dokumen yang anda gunakan, andaikata misalnya anda ingin mengajukan permohonan ke MK terkait penyelesaian perselisihan hasil itu," tegasnya dikutip detikcom.

Menurut Enny, MK memiliki fungsi dan kewenangan berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hasil. Jadi yang mereka tunggu itu memang pada akhirnya hasil akhir yang telah ditetapkan oleh KPU yaitu rekapitulasi hasil akhirnya bukan final sekali sampai proses sengketa itulah yang final. Jadi, hasil yang sudah ditetapkan oleh KPU. Itu yang harus mereka tunggu.

Enny menegaskan MK memang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hasil. Apabila kita baca dengan cermat UU pemilu, sesungguhnya UU tersebut sudah membagi habis semua kewenangan.

"Kewenangan KPU tegas, apalagi Bawaslu, MK itu adanya di ujung yaitu terkait dengan perselisihan hasil. Hasil itu keluarnya angka-angka yang ditetapkan oleh

## Usut Upaya ...

korupsi hingga kepemilikan senjata api.

"Iya kalau itu bener (3 perkara). Apa tadi? Satu korupsinya, dua senjatanya, tiga upaya penyalpan dokumen," kata Mahfud seuai upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur, Minggu (1/10).

"Ya harus diusut, itu tindak pidana sendiri kalau memang ada, saya tidak tahu, belum dengar. Tapi kalau itu memang ada harus diusut. Satu korupsinya sendiri itu adalah tindak pidana, penghilangan dokumen tindak pidana juga, ada hukumannya sendiri, itu harus dikejar," imbuhnya.

Mahfud menambahkan, pemerintah mendukung pengusutan setiap perkara yang ada. Jika ada kesulitan, lanjut Mahfud, dia akan turun tangan membantu pengusutan.

"Pasti, dong (pemerintah mendukung pengusutan). Kalau ada kesulitan di situ, bilang ke saya, saya turun tangan," imbuhnya dikutip detikcom.

## Senjata Api Disita

Sebagaimana diketahui, sebanyak 12 senjata api ditemukan saat tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di kawasan Jakarta Selatan. Belasan senjata api itu diketahui berjenis revolver S&W hingga Tanfoglio.

"Ada S&W, Walther, Tanfoglio, dan lain-lain," kata Dirintelkam Polda Metro Jaya Kombes Hirbak Wahyu Setiawan saat dihubungi, Sabtu

## Sumbar Perlu ...

0,88 poin menjadi 74,14 persen. Namun angka itu masih jauh dari kategori tinggi yakni 80 poin.

"Di Indonesia yang mencapai 80 poin itu di antaranya DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Kalimantan Timur. Kita berharap Sumbar bisa bekerja keras melaju ke angka itu," harapnya.

Kemudian untuk kemampuan fiskal, APBD Sumbar tahun 2023 Rp6,8 triliun. Ini tergolong rendah, terlebih Sumbar masih sangat tergan tung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Bisa menjadi masalah karena akhir-akhir ini pemerintah pusat semakin mengetatkan pembagian dana dan mengakibatkan semakin sedikit daerah menerima dana transfer.

"Di Pulau Sumatera, provinsi yang punya APBD mencapai di atas Rp10 triliun itu Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Riau. Semoga Sumbar semangat mengejar," katanya lagi.

Kemudian pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2023 Sumbar mencapai angka 4,36 persen. Memang ada kenaikan secara bertahap, namun angka ini masih di bawah rata-rata nasional dimana untuk tahun 2023 adalah di atas 5 persen.

Sementara dua indeks lain, Sumbar memiliki prestasi baik, yakni angka kemiskinan yang jauh di bawah rata-rata nasional yakni 5,95 persen atau sebanyak 340 ribu orang. Sementara rata-rata nasional di atas 9 persen.

Satu indikator terakhir, Indikator Demokrasi Indonesia (IDI), menurut Djohermansyah, capaian Sumbar cukup baik, yakni 78 poin untuk kebebasan dan 79 untuk kesetaraan. Hanya perlu peningkatan untuk kapasitas lembaga demokrasi yang baru mencapai 73 poin.

Ia menilai, ada beberapa kendala yang dihadapi Sumbar selama ini, yakni posisi geografis yang berada di posisi kurang mendu kung, yakni pantai barat Sumatera, minimnya sumber daya alam (minerba).

"Selain itu, industri dan jasa tak berkembang, kemandirian fiskal yang masih tergantung pada dana pemerintah pusat, kolaborasi dengan stakeholder yang belum optimal dan relasi dengan pemerintah pusat yang kurang terjalin," ujarnya.

Djohermansyah menyarankan sejumlah solusi untuk dilakukan demi meningkatkan semua indikator itu, yakni pandai-pandai menjalin relasi dengan pemerintah pusat (penguasa negara), rangkul erat perantau Minang, perkuat perencanaan terintegrasi (kabupaten/kota, provinsi, pemerintah pusat). "Kemudian, bangun governansi publik, gerakkan desentralisasi secara masif dan kembangkan pilot project DPRD inovatif," katanya.

Sementara itu, pada kesempatan sebelumnya, Ketua DPRD Sumbar, Supardi, mengajak untuk merenungkan bersama, apakah perkembangan

KPU. Ini yang kadang-kadang oleh beberapa orang mereka bilang MK itu kayak Mahkamah Kalkulator gitu, lho yang dihitung itu cuma angka-angka. Jangan melihatnya secara sempit seperti itu. Kenapa? Karena memang yang diberikan oleh konstitusi maupun undang-undang adalah penyelesaian perselisihan hasil," ucap Enny.

"Di balik hasil itulah kemudian banyak permohonan yang mendailikan ada persoalan yang mempengaruhi hasil tersebut. Bisa jadi persoalan itu bermuara pada proses yang seharusnya proses itu sudah selesai oleh KPU maupun Bawaslu. Tetapi ternyata bisa jadi proses itu tidak selesai atau bahkan tidak bisa ditangani dengan baik oleh kedua lembaga penyelenggara itu," ucap Enny lagi.

Ia menyebut, hal itulah yang kemudian dalam rangka keadilan pemilu tidak ada lembaga lain yang dapat menyelesaikan itu. Bahkan kepada Bawaslu pun MK telah menyampaikan ketika perkara sudah masuk ke MK harus stop di Bawaslu supaya tidak menimbulkan persoalan.

"Di sinilah kemudian bisa jadi dari berbagai putusan MK sudah ada beberapa putusan yang berkaitan dengan proses. Bahkan untuk pilkada, MK telah memutus karena telah terbukti betul ada persoalan disitu mau tidak mau harus mendiskualifikasi calon tersebut. Jadi, memang pemelukadanya harus diulangi," ungkapnya.

Enny juga menerangkan MK menggelar sidang secara terbuka dan tidak ada yang ditutupi. Berkeanan dengan hal itu, Enny mengatakan, apa yang telah dilakukan bimtek kepada partai peserta pemilu, KPU, Bawaslu dan Advokat itu tidaklah mencukupi. Sehingga MK berharap sekali dari APHTN-HAN seperti menjemput bola ikut membantu bagaimana di lapangan proses itu terutama kemudahan pemahaman kepada mereka. Hal ini dikarenakan dalam mengajukan permohonan menggunakan gunakanlah waktu itu semaksimal mungkin. (\*)

(30/9).

Hirbak mengatakan pihaknya masih mendalami asal-usul hingga legalitas 12 senpi yang ditemukan di rumah Syahrul Limpo. Polda Metro Jaya juga tengah berkoordinasi dengan Baintelkam Polri dalam mengusut izin kepemilikan senjata api tersebut.

"Sedang dikordinasikan dengan Baintelkam untuk dicek izinnya," ujar Hirbak.

## Pelenyapan Barang Bukti

Sebelumnya, KPK menggeledah gedung Kementan pada Jumat (29/9) siang. Ruang kerja Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Sekjen Kementan Kasdi Subagyo menjadi lokasi yang digeledah penyidik KPK.

Kegiatan itu rupanya sempat diwarnai upaya perlawanan. Ada pihak yang mencoba untuk memusnahkan bukti dokumen.

"Dari informasi yang kami terima saat tim penyidik KPK melakukan pengeledahan di gedung Kementan RI di Jakarta Selatan, tim penyidik mendapati adanya dokumen tertentu yang dikondisikan dan diduga akan dimusnahkan," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu (30/9).

Ali mengatakan dokumen yang coba dihilangkan tersebut berupa bukti aliran uang korupsi yang diterima para tersangka di kasus tersebut.

"Beberapa dokumen dimaksud diduga kuat adalah bukti adanya aliran uang yang diterima para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," jelas Ali. (\*)

Sumbar hari ini sudah berjalan sesuai yang diharapkan atau belum?

Supardi mengajak semua stakeholder meng evaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang sudah dijalankan, apakah sudah sesuai dengan amanat undang-undang atau belum. Baik itu tentang penanganan permasalahan kemiskinan, soal pendidikan, pemerataan pembangunan, dan yang lainnya.

"Harus sampai ke sana kita memaknainya. Kita Sumbar sudah sampai mana? Dari sekian banyak provinsi di Indonesia, Sumbar berada di mana?" tanyanya.

Ia menuturkan, republik ini hampir 70 persennya didirikan oleh orang Minang. Sumbangsih orang Minang dalam pendirian republik ini begitu luar biasa. Ia berharap sukses orang Minang di masa lalu dengan tokoh-tokoh yang begitu dikenal di tingkat nasional dan bahkan dunia tersebut, hendaknya juga bisa tergambar pada saat sekarang.

"Artinya, kita tidak ingin Sumatera Barat menjadi provinsi terbelakang, kalau bisa Sumbar hendaknya sebagai lokomotif dari provinsi-provinsi yang lain. Meski dari jumlah penduduk maupun luas wilayah kita masih kalah dengan Jawa, tapi secara kualitas manusianya, pembangun, kita harus di atas provinsi lain, karena itu yang dicontohkan para pendahulu kita," katanya.

Berangkat dari hal tadi, jelas dia, tentunya sangat penting bagi semua stakeholder untuk menjadikan momentum peringatan Hari Jadi Sumbar sebagai momen evaluasi atas kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan.

Bicara potensi, Sumbar dinilai memiliki banyak keterbatasan baik dari sisi sumber daya alam, industri, maupun dari sisi pariwisata yang masih banyak jauh ketinggalan. Sebab itu, untuk bisa maju Sumbar harus bisa menonjolkan apa yang tak dimiliki daerah lain, sebagai contohnya adalah otak. Sumbar harus bisa menjadi daerah industri otak yang mampu melahirkan orang-orang cerdas seperti yang pernah ada sebelum nya.

"Sumbar harus bisa memproduksi orang-orang cerdas, bukan pintar ya, karena menurut saya cerdas dengan pintar itu berbeda. Pergu ruan tinggi, tiap tahun mampu melahirkan orang pintar, tapi cerdas tidak," katanya.

Dikatakannya, tokoh-tokoh nasional asal Minang pada masa dahulu yang dikenal dengan kecerdasannya seperti Agus Salim, Mohammad Hatta, M. Natsir dan Tan Malaka serta beberapa yang lainnya. Supardi menegaskan, SDM dengan kecerdasan seperti itu lah yang mestinya dikejar.

"Itulah sumber daya yang harus kita kelola yang tidak dimiliki daerah lain. Karena untuk membangkitkan kembali Sumbar kita butuh pemimpin-pemimpin yang cerdas, tidak hanya pemimpin yang pintar," ujar Supardi. (401)



## DPRD Sumbar Peringati Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ke-78

**M**emperingati Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ke-78, DPRD Sumbar melaksanakan rapat paripurna istimewa, Minggu (1/10) di gedung DPRD. Hari jadi Sumbar jatuh pada tanggal 1 Oktober 1945.

Tahun 2023, merupakan kali keempat peringatan Hari Jadi Sumbar setelah peraturan daerah (perda) sebagai payung hukumnya disahkan DPRD pada 2019 lalu.

Peringatan Hari Jadi Tahun 2023 mengusung tema "Sumbar Terus Maju Menuju Sejahtera". Tema yang diharapkan menjadi semangat untuk bersama-sama mewujudkan provinsi ini menjadi semakin sejahtera.

Rapat paripurna tersebut dilaksanakan meriah dengan berbagai rangkaian acara. Ada pemaparan materi dari Dosen Universitas Indonesia yang juga merupakan Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri 2010, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan tentang capaian Sumbar.

Dilaksanakan pula penandatanganan kerja sama DPRD Sumbar dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk mewujudkan DPRD sebagai rumah literasi bagi masyarakat.

Penyerahan penghargaan untuk kader posyan du terbaik, pengurus LPM terbaik, KAN terbaik dan penghargaan tokoh anak.

Ada pula penampilan tari, penampilan vocal grup SMA 2 Payakumbuh yang menyanyikan lagu Mars Sumbar hingga pembacaan puisi oleh penyair Iyut Fitra. Kemudian peluncuran lima inovasi baru Sekretariat DPRD Sumbar.

Selain unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar, hadir dalam rapat paripurna tersebut, gubernur Mahyeldi Ansarullah, wakil gubernur Audy Joinaldi.

Turut menghadiri pula unsur forum komunikasi daerah (For-kopimda) Sumbar, Anggota DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan Sumbar, Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Tenggara, Mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Mantan Ketua DPRD Sumbar, Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar.

Tak terlupe juga pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN, pimpinan BUMD, rektor perguruan tinggi negeri dan swasta, bupati/walikota, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumbar, Ketua MUI, Ketua LKAAM dan Tokoh-Tokoh masyarakat.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan peringatan Hari Jadi Sumbar ke-78 kali ini dilaksanakan dengan penuh kegembiraan serta sudah mulai terasa pelaksanaannya sejak awal bulan September.

"Hal ini terlihat dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di berbagai kabupaten/kota, seperti kegiatan Minangkabau Basapada Salingka Danau Singkarak dan penggunaan baju kurung basiba di berbagai OPD serta berbagai kegiatan lainnya," ujarnya.

Supardi menegaskan tanggal 1 Oktober 1945 dijadikan sebagai titik tolak Hari Jadi Sumbar karena KNID-SB (Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Barat) pada 1 Oktober 1945 memutus-



kan untuk membentuk kembali keresidenan Sumatera Barat dan mengambil alih kekuasaan dari pendudukan Jepang.

Oleh sebab itulah, pada setiap tanggal 1 Oktober sebagai salah satu rangkaian peringatan hari jadi Sumatera Barat dilakukan

Rapat Paripurna DPRD. "Tanggal 1 Oktober 1945, merupakan Hari Jadi Provinsi Sumbar sebagai kesatuan ma-

syarakat dan daerah dalam kerangka NKRI. Penetapan tanggal 1 Oktober 1945, tentu tidak mengurangi makna dan eksistensi daerah Sumbar yang telah ada jauh sebelum penetapan hari jadi tersebut," katanya lagi.

Supardi memaparkan, sejarah perjalanan panjang Sumbar, baik sebelum maupun setelah ditetapkannya hari jadi, telah membawa daerah ini pada kondisi yang mengalami pasang surut. Banyak kemajuan-kemajuan yang telah di capai dalam peradaban kehidupan masyarakat. Namun tentu saja masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi bersama.

Dalam rapat paripurna tersebut Supardi juga menuturkan tentang kata-kata yang sempat disampaikan beberapa tokoh yang telah berkenan hadir pada peringatan hari jadi Sumbar

pada tahun-tahun sebelumnya.

Salah satunya, sambuta Jusuf Kalla, Mantan Wakil Presiden RI. Yakni tentang kekuatan Sumbar terletak pada Sumber Daya Manusianya. Sumbar bisa maju karena SDMnya. Dengan kata lain orang Minangkabau memakai otaknya, bukan otot.

"Tapi sekarang kemajuan itu sudah berubah, saat ini Sumbar tidak lagi menjadi gudangnya para intelektual, tingkat kemajuan ekonominya tidak sesuai dengan kemampuannya, hingga makin hilangnya ulama asal Sumbar yang berkiprah di kancah nasional," ujar Supardi.

Lalu, ungkapan Buya Syafii Maarif yang mengatakan saat ini elit Sumbar sudah mengalami defisit. Hal ini ditandai dengan jumlah negarawan yang semakin berkurang berkiprah di tingkat nasional dan banyaknya politikus yang hanya mencari mata pencarian, bukan untuk mem bela penderitaan rakyat.

"Oleh sebab itu sekarang saatnya berbenah. Dari partai manapun asalnya, mari bersama bahu membahu dalam membangun daerah ini. Sumbar dengan PAD yang sangat terbatas, harus pandai-pandai memainkan kartu berhadapan dengan pemerintah pusat," paparnya.

Kemudian, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, di Hari Jadi Sumbar ke-76 memaparkan dua faktor utama yang potensial untuk memajukan Sumbar, yakni sektor pertanian dan perikanan. Agro dan maritim adalah keunggulan masyarakat untuk menjadikan Sumatera Barat madani.

Terdapat 11 sektor kelautan yang bisa dikembangkan di Sumatera Barat. Perlu fokus pada empat sektor utama, yaitu perikanan budidaya, Perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran produk kelautan perikanan, serta bio teknologi kelautan. Salah satu sektor perikanan budidaya yang menjanjikan di Sumbar menurut Rokhmin adalah budidaya udang vaname.

"Di Sumbar ada 54 ribu hektar potensi budidaya udang vaname. Jika Sumbar bisa mengembangkan pada 10 hektar saja, sedikitnya Rp.56 Triliun bisa diraup. Belum lagi tenaga kerja yang bisa diserap," paparnya.

Supardi menegaskan, Semua hal tersebut, perlu direnungkan bersama sehingga dapat menjadi arah dan gambaran bagi untuk bekerja lebih keras mencapai Sumbar Terus Maju menuju Sejahtera.

"Kami berharap, Peringatan Hari Jadi Sumbar ke 78 Tahun 2023 ini, kita jadikan momentum untuk bangkit dan mengejar ketinggalan-ketinggalan yang kita alami," tegas Supardi. (\*)





**Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Mengucapkan :**

## Selamat Hari Jadi

**SUMATERA BARAT KE- 78 TAHUN**  
**1 OKTOBER 2023**



*Tertanda*



**H. IRSYAD SYAFARL, LC, M. Ed**  
WAKIL KETUA DPRD SUMBAR

**SUPARDI**  
KETUA DPRD SUMBAR

**H. SWIRPEN SUIB, S. Sos**  
WAKIL KETUA DPRD SUMBAR

**H. INDR A DT. RAJO LELO, SH, MM**  
WAKIL KETUA DPRD SUMBAR